BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif.

Partisipasi warga/rakyat negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemillihan Presiden tahun 2009 yang lalu. Rakyat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan Presiden secara langsung untuk memilih siapa yang akan menduduki pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depannya.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kadaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara. Proses pemilihan Kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan, pemilihan, penyelenggaraaan pemilihan, penetapan politik, pendanaan dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Hal tersebut di atas pada umumnya dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang diatur melalui Undang-Undang yaitu selama 4 tahun sekali. Antusias masyarakat akan terlihat pada saat pemilihan umum akan berlangsung yaitu dari mulai penetapan calon, kampanye hingga pemilihan berlangsung.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ±18.110 pulau yang dimilikinya, dengan begitu banyaknya kecamatan dan juga banyaknya beberapa pedesaan yang tersebar di beberapa pulau tersebut. Salah satu contoh Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao yang terletak disalah satu Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia terletak ±80 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kerawang di bagian Barat dan sebagian wilayah utara, Kabupaten Bandung di bagian selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat Daya.

Provinsi Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan luas wilayahnya 35.377,76 km2. Menurut data siak, Provinsi Jawa Barat didiami

penduduk sebanyak 46.497.175 juta jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 kabupaten/kota, 625 kecamatan dan 5.899 desa/kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di kota banjar yaitu sebanyak 192.903 jiwa (0,43 %).

Masyarakat Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember tepatnya tanggal 15 Desember 2012 sudah menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta periode 2013/2018. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 971,72 km² atau sekira 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat berpenduduk 845.509 jiwa (Proyeksi jumlah penduduk tahun 2009) dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,28% per-tahun. Jumlah penduduk laki-laki adalah 420.380 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 425.129 jiwa.

Politik sebagai suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat untuk pembuatan keputusan dalam suatu Negara. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal awal terbentuknya system politik di Indonesia, kemudian membentuk pemerintahan yang sah dan menjalankan roda kepemimpinan dalam sebuah system kenegaraan. Hal ini ditandai dengan berbagai istilah di masa-masa kepemimpinan yang berbeda. Pada awal kemerdekaan, situasi politik masih mencari bentuknya, ditandai dengan beberapa perubahan yang dibuat. Pembentukan sifat politik menghadirkan era kepemimpinan politik yang berbeda dari masa kemerdekaan hingga reformasi.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung menjadi kebutuhan rakyat yang utama dalam upaya mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan

otonomi daerah yang ditujukan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya, yang terjadi justru maraknya perilaku elit Lokal baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang lebih mempertontonkan dan mengutamakan kepentingan pribadi dari pada untuk kepentingan masyarakat luas seperti yang ditunjukkan dengan maraknya politik uang *(money politicy)* dan dominannya kepentingan partai politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas.

Pilkada langsung merupakan sarana yang paling tepat digunakan oleh masyarakat saat ini, guna menyeleksi calon-calon pemimpin yang mampu membawa perubahan, kemajuan, dan perkembangan bagi daerah dan masyarakatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Pilkada dapat menjadi kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan, manakala masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab mampu mengamati visi dan misi kandidat Kepala Daerah ketika menyampaikan program kampanye, dengan mengetahui latar belakang riwayat hidup kandidat, sampai memutuskan calon Kepala Daerah yang akan dipilih.

Pada Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao partisipasi masyarakatnya masih rendah, khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, hal ini ditunjukkan dengan hasil data yang diperoleh dari lapangan, berikut hasil data Berdasarkan data dari tim pemilihan kepala daerah komisi pemilihan umum (KPU) dengan luas wilayah Desa Ciwareng seluas 368 Ha dengan jumlah penduduk 7.868 dan jumlah penduduk yang sudah mempunyai

hak suaranya untuk memilih sekitar laki-laki 2.866 sedangkan perempuan 2.856 dan jumlah hak suara yang bisa memilih sekitar 5722 dengan jumlah TPS yang tersebar sebanyak 12 TPS, akan tetapi data yang sah dalam perhitungan suara yang masuk adalah berjumlah 3.563 suara namun ada sebanyak 147 suara yang tidak sah, dan jumlah suara yang sah dan tidak sah 3.710 suara, bisa dilihat sekitar 40% masyarakat Desa Ciwareng yang tidak antusias dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2012 di Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari data yang di peroleh tim KPU Desa Ciwareng ini menandakan masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2012. Sebagian besar masyarakat yang tidak ikut serta dalam menyumbangkan hak suara mereka pada saat berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dilaksanakan adalah dari kaum laki-laki.Kebanyakan dari mereka tidak ikut antusias pada saat pencoblosan atau pada saat berlangsungnya pemilihan dilaksanakan adalah karena masalah faktor sosial ekonomi, mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan harus menyumbangkan hak suara mereka dalam pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan.Karena bagi mereka dengan bekerja sudah jelas mereka bisa menghasilkan upah dari pada harus mengikuti pencoblosan yang tidak ada untungnya bagi mereka, khususnya dibagian mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Sedangkan bagi kaum perempuan yang tidak ikut berpartisipasi politik dikarenakan faktor pendidikan, mereka belum mengetahui bagaimana harus

memilih pasangan calon pemimpin yang baik dan bisa memimpin sebuah daerah di Kabupaten Purwakarta, dengan begitu masih banyak golput yang terjadipada saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

Seiring berjalannya proses partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, tentunya banyak permasalahan yang timbul baik pro dan kontra. Salah satunya yaitu permasalahan seputar pemberian suara dalam pemilihan umum yang hingga saat ini masih belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menghadiri rapat umum guna membahas lebih lanjut terkait kegiatan seputar pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan.

Hal ini bisa terjadi karena tim sukses dari setiap-setiap pasangan calon tidak bisa mengajak masyarakat untuk menyumbangkan hak suara mereka dalam pelaksanaan pencoblosan berlangsung. Mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk ikut serta memilih dan menyumbangkan hak suara mereka dalam proses pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Purwakarta. Begitupun dari aktivitas pasangan calon masing-masing, mereka tidak bisa mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memilih calon yang mana yang harus mereka pilih sebagai pemimpin atau calon Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya.

Untuk melakukan partisipasi politik, diperlukan pula hubungan yang erat dengan pejabat pemerintahan guna menjalin tali silaturahmi antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan sekitar, namun hingga saat ini hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan belum dapat berjalan

dengan harmonis sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik yang dihasilkan oleh masyarakat. Tidak berjalannya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan pula mengakibatkan sulitnya masyarakat yang ingin bergabung untuk menjadi anggota partai politik dalam suatu partai.

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah, dikarenakan masih banyak pro dan kontra yang terjadi seiring berjalannya proses partisipasi politik yang dihasilkan dari masyarakat, dan peneliti mengambil judul Skripsi yaitu:

"Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta" (Suatu Studi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini. Peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2012. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian suara dalam pemilihan Kepala Daerah masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam menghadiri rapat umum terkait pemilihan Kepala Daerah Purwakarta Tahun 2012?
3. Untuk mengetahui hubungan pejabat pemerintah dengan masyarakat Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2012?
4. Untuk mengetahui anggota partai politik yang ada di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta pada proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2012?

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dari segi ilmiah, teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan memahami partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, sehingga mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari teori mengenai partisipasi politik yang dikemukakan para ahli dan dapat dijadikan pengembangan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahanliteratur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis, di harapkan penelitian dapat bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, di Kabupaten Purwakarta.